LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU

Bulan	Permohonan		Waktu rata-	Jumlah permohonan yang dikabulkan		Jumlah	Alasan permohonan ditolak		
	Unit Kerja	Jumlah	rata pelayanan (hari kerja)	Sepenuhnya	Sebagian	permohonan yang ditolak	Dikecualikan	Tidak dikuasai/ belum selesai di dokumentasikan	Lainnya
Januari	-	57	1 sampai 3	57	-		-	-	-
Februari	-	30	1 sampai 3	30	-		-	-	-
Maret	, -	25	1 sampai 3	25	-		-	-	-
April	-	23	1 sampai 3	23	-		-	-	_
Mei	-	33	1 sampai 3	33	-		-	-	· · · ·
Juni	-	27	1 sampai 3	27	-		-	-	_
Juli	-	22	1 sampai 3	22	-		-		-
Agustus	-	26	1 sampai 3	26	-		-	-	-
September	-	12	1 sampai 3	12	-		-	_	-
Oktober	-	18	1 sampai 3	18	-		-		_
November	-	21	1 sampai 3	21	-		-	-	-
Desember	-	14	1 sampai 3	14	-		-	-	-

E Atasan PPID Pelaksana Dinas Perumahan dan Permukiman,

DINAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN

MURIANI, ST

Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 199403 2 012

LAPORAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU

	Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian	Hasil Mediasi/ Ajudikasi non Litigasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
Bulan		Menerima	Menolak	Sengketa ke Komisi Informasi	Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Permohonan Informasi

Atasan PPID Pelaksana Dinas Perumahan dan Permukiman,

> MURIANI, ST Pembina Utama Muda NIP. 19670807 199403 2 012

KENDALA DAN SARAN DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PADA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANJARBARU

KENDALA	SARAN
Tahun 2022 SKPD tidak memiliki Petugas Resepsionis (<i>Front Office</i>) sehingga petugas yang meminta informasi tidak terkontrol dengan baik ke Admin SIP-PPID	Perlu Petugas Resepsionis di Tahun 2023 untuk melayani dan mengarahkan masyarakat yang memerlukan informasi publik
Kurangnya penyediaan fasilitas yang belum lengkap untuk pelayanan (<i>Front Office</i>) yang menunjang kualitas pelayanan publik	Perlu tersedianya fasilitas yang lengkap karena kurangnya dukungan fasilitas maka akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada stakeholder
Kurang pemahaman tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di SKPD	Perlu sosialisasi internal terutama kepengurusan Pejabat Pengelola Informasi agar peran sertanya di PPID berfungsi dengan baik sehingga pelaporan permintaan informasi tersebut bisa terkoordinasi sistematis

Dinas Perumahan dan Permukiman, DINAS PERUMAHAN

MURIANI, ST A R Pembina Utama Muda NIP. 19670807 199403 2 012